KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/TIDAK FINAL						
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 5 8			H.4 X Final			
		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : NISRINA ULFAH, AMD.KEP.								
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
2	21-402-01	1.023.900	1.023.900	0	5	51.195		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 56								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
	ansi Pemerintah :							
C.3 ID Subunit	Organisasi :					_		
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Pena	ndatangan :	HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	mengatur bahwa dok	umen ini tela	h ditandatangani secara		

WWXJ4CKA